



Polemik Halal Tourism dalam Analisis Ekologi Budaya di Desa Wisata Tomok Kabupaten Samosir

The Halal Tourism Polemic in Cultural Ecological Analysis in The Tomok Tourist Village, Samosir District

**Dedi Andriansyah*, Windo Putra Sanjaya Simbolon, Jeremia Manik &
Ardiansyah**

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang penolakan wacana halal, adaptasi sosial budaya masyarakat lokal Batak Toba dengan pendatang muslim yakni etnis Jawa dan Minang di Desa Wisata Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Teori yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian adalah ekologi budaya Julian Steward. Adaptasi ekologi budaya adalah proses penyesuaian diri secara berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungannya yang mengutamakan penerapan konsep dan asas ekologi pada aspek kehidupan sosial yang benar-benar sesuai dengan masyarakat setempat. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif secara observasi partisipasi, wawancara etnografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latarbelakang penolakan wacana *halal tourism* dirumuskan pada tiga aspek: 1) struktural yaitu ambiguitas konsep wisata halal secara vertikal, 2) kultural yaitu ancaman terhadap ekosistem ekologi dan budaya, 3) proses sosial yaitu gangguan pada ekosistem sosial. Proses adaptasi sosial budaya terbentuk melalui: 1) *culture core*, yaitu terjalin ikatan ekonomi, 2) *social integration*, yaitu pelibatan pendatang etnik Jawa dan Minang dalam struktur adat, 3) fitur budaya, yaitu partisipasi sosial dan terciptanya hubungan resiprositas masyarakat lokal Batak Toba dengan etnis pendatang, 4) eksploitasi lingkungan, yaitu konsep tata ruang yang membentuk tipologi wilayah, 5) subsistensi lingkungan, yaitu stabilitas kebudayaan falsafah Batak Toba *dalihan na tolu*.

Kata Kunci: Halal Tourism; Samosir; Ekologi Budaya,

Abstract

This research aims to determine the background to the rejection of halal discourse, the socio-cultural adaptation of the Toba Batak local community to Muslim immigrants, namely the Javanese and Minang ethnic groups in the Tomok Tourism Village, Simanindo District, Samosir Regency. The theory used as an approach in research is Julian Steward's cultural ecology. Cultural ecological adaptation is a process of continuous adjustment carried out by humans with their environment which prioritizes the application of ecological concepts and principles to aspects of social life that are truly appropriate to the local community. This research method is qualitative research. Qualitative data collection techniques include participant observation, ethnographic interviews. The research results show that the background to the rejection of halal tourism discourse is formulated in three aspects: 1) structural, namely the ambiguity of the concept of halal tourism vertically, 2) cultural, namely threats to the ecological and cultural ecosystem, 3) social processes, namely disruption of the social ecosystem. The socio-cultural adaptation process is formed through: 1) culture core, namely the establishment of economic ties, 2) social integration, namely the involvement of Javanese and Minang ethnic immigrants in traditional structures, 3) cultural features, namely social participation and the creation of reciprocal relationships between the local Toba Batak community and ethnic immigrants, 4) environmental exploitation, namely the concept of spatial planning that forms regional typologies, 5) environmental subsistence, namely the cultural stability of the Batak Toba philosophy of dalihan na tolu.

Keywords: Halal Tourism; Samosir; Cultural Ecology,

How to Cite: Andriansyah, D., Sanjaya, W.P., Manik, J., & Ardiansyah. (2024). Polemik Halal Tourism Dalam Analisis Ekologi Budaya di Desa Wisata Tomok Kabupaten Samosir. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(1) 2024: 1-10

*E-mail: dediandriansyah61@gmail.com

ISSN 2721-7507 (Online)



PENDAHULUAN

Pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan dari satu tempat menuju tempat lainnya yang sifatnya sementara. Pariwisata dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa penat yang dialami akibat bekerja secara terus-menerus sehingga berkeinginan melakukan perjalanan untuk berekreasi (Sugiyarto & Amaruli, 2018). Dewasa ini pariwisata sudah menjadi kebutuhan bagi manusia di samping kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Pariwisata sebagai kebutuhan menjadi bagian penting dalam hidup manusia dalam rangka menyeimbangkan diri dari rutinitas keseharian manusia. Oleh karena itu, muncullah berbagai usaha dalam memenuhi kebutuhan berwisata. Pariwisata halal atau yang dikenal dengan istilah *halal tourism* merupakan salah satu konsep wisata yang berkembang secara global saat ini. *Halal tourism* dipahami sebagai suatu standarisasi penerapan wisata (aspek fisik, aspek pelayanan dan aspek sosial budaya) yang ramah terhadap wisatawan muslim seperti fasilitas layanan halal dalam seluruh kegiatan saat melakukan perjalanan baik dari makanan dan minuman yang dikonsumsi, akomodasi seperti penginapan, fasilitas tempat ibadah harus tersedia dan memiliki sertifikasi halal (Nasution, 2022). Secara sederhana *halal tourism* dapat diartikan sebagai penerapan wisata yang mengacu pada konsep 3A yaitu Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas.

Menurut (Anwar, 2022) mengatakan tujuan pengembangan wisata halal *“The purpose of developing halal tourism is to attract tourists from all religions, be it Muslim or non-Muslim communities, so it is quite vital considering the many benefits that will be received. However, it is important to note that, while this concept is available to everyone, the convenience of Muslim worship is an important consideration in any standard tourism offering. This means that both Muslim and non-Muslim tourists will be able to enjoy the convenience without having to share it with others, thereby potentially increasing the number of visitors”*.

Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejatinya telah mengembangkan konsep *halal tourism* menjadi program nasional, mengingat Indonesia adalah negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam laporan perkembangan pariwisata ramah muslim daerah pada tahun 2019-2020, bahkan telah merilis wilayah Lombok sebagai destinasi pariwisata di Indonesia yang paling ramah muslim dengan melihat dari keunggulan pada dua aspek, yakni aspek komunikasi yaitu adanya *Muslim Visitor Guide, Travel Halal Mart, Stakeholder Education, dan Digital Marketing*. Kemudian aspek pelayanan yang menyediakan 316 Rumah makan bersertifikat halal, 50 masjid, 10 hotel bersertifikat halal dan atraksi yang terdiri dari situs budaya Islami.

Sayangnya, standarisasi keberhasilan ini hanya dilihat dari aspek pendukung fisik dan pelayanan saja, tanpa melihat pada aspek sosial budaya dimana pengembangan *halal tourism* mengalami penyeragaman terutara di daerah-daerah dengan penduduk mayoritas non-muslim sehingga menciptakan keadaan dilematis yang masih membutuhkan proses adaptasi dalam implementasinya. Oleh karena itu pengembangan wisata halal di Indonesia masih memunculkan pandangan yang beragam dari masyarakat dan berpotensi terjadinya penolakan apabila tidak terpahami secara menyeluruh tentang *halal tourism* (Santoso & Cahyani, 2020)

Terdapat beberapa hasil temuan sebelumnya (*previous studies*) yang relevan dengan topik penelitian ini. Pertama, hasil penelitian (Makhasi & Rahimadhi, 2020) yang berjudul “Ramai-ramai Menolak Wisata Halal: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan penolakan wacana penerapan wisata halal yang terjadi di Labuhan Bajo. Penolakan wacana penerapan wisata halal merupakan respon dari masyarakat yang menganggap wacana wisata halal dapat merusak hubungan toleransi antara masyarakat Kristen dan masyarakat Muslim yang selama ini terjalin dengan baik. Labuhan Bajo membuka diri untuk wisatawan muslim tetapi tidak perlu label halal. Hal ini dikarenakan gagasan wisata halal bersifat eksklusif, tidak menghormati kebhinekaan dan kemajemukan.

Selanjutnya, penelitian (Putra, 2021) yang berjudul *“Development of Halal Tourism The Land Above The Clouds In North Toraja Regency”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan wisata halal di Kabupaten Toraja Utara sempat mengalami penolakan yang dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga penerapan wisata halal mengalami polemik dan penolakan.

Kemudian penelitian yang dilakukan (Hidayati Dkk, 2022) yang berjudul “Implementasi Wisata Halal Indonesia: Polemik *Center of Halal Tourism* di Kota Malang”. Hasil penelitian menjelaskan adanya Program *Center of Halal Tourism* di kota Malang yang merupakan program yang berfokus pada industri pariwisata agar mendukung konsep wisata halal. Namun program ini menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat karena hadirnya konsep *halal city* dianggap

bertentangan dengan perundang-undangan dan mengganggu kondisi kota Malang sebagai kota yang menjalankan toleransi dan menjunjung tinggi pluralisme.

Terakhir, penelitian yang dilakukan (Marbun, 2022) yang berjudul “Diskursus Pengembangan Pariwisata Syariah di Bali”. Penelitian ini menegaskan bahwa wacana implementasi pariwisata syariah di Bali tidak berjalan sesuai dengan harapan bahkan menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat diantaranya pihak pemangku kepentingan pariwisata syariah dan pemangku kepentingan pariwisata budaya Bali.

Keadaan tersebut juga terjadi di wilayah Kabupaten Samosir yang menjadi destinasi wisata internasional dengan pengembangan *Halal tourism* di dalamnya. Wacana *halal tourism* ternyata juga mendapatkan penolakan dari etnik Batak Toba yang merupakan masyarakat setempat pulau Samosir. Penolakan ini diwujudkan dalam aksi masyarakat yang membentangkan spanduk yang bertuliskan “Danau Toba Tidak Butuh Label Halal” salah satunya di Kecamatan Simanindo. Wacana *halal tourism* yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara dianggap dapat menimbulkan segregasi antar umat beragama dan suku bangsa khususnya di wilayah Danau Toba (Tarigan & Basit, 2020).

Penolakan terhadap wacana *halal tourism* tersebut menciptakan isu liar yang berkembang tentang orang Batak di Samosir yang anti halal, intoleransi dan bahkan dianggap anti islam. Hal ini juga dikaitkan dengan latarbelakang orang Batak di Samosir yang mayoritas menganut agama kristen. Padahal saat peneliti melakukan pra observasi ke kabupaten Samosir khususnya di Desa Wisata Tomok Kecamatan Simanindo, terlihat implementasi *halal tourism* sudah terlaksana seperti adanya mesjid, mushola, dan rumah makan halal. Stigmatisasi ini tentu akan memberikan dampak yang buruk terhadap keberlangsungan pariwisata di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir apabila tetap dibiarkan.

Latarbelakang inilah yang kemudian menjadi landasan peneliti untuk kemudian melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan polemik *halal tourism* tersebut dalam analisis budaya. Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai langkah antisipasi isu dan penelusuran latarbelakang penolakan. Selain itu juga untuk mengungkapkan adaptasi sosial budaya terkait *halal tourism* di lingkungan masyarakat Kecamatan Simanindo, serta digitalisasi daya dukung aspek fisik *halal tourism* berbasis Geospasial menggunakan Pemetaan Arcgis 10.8. Sehingga polemik *halal tourism* di Kecamatan Simanindo dapat terjawab secara holistik dengan analisis keilmuan yang dimiliki oleh peneliti, yakni analisis budaya melalui keilmuan Antropologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Lokasi penelitian merupakan salah satu lokasi yang memberikan penolakan terhadap rencana *halal tourism* dan juga sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Samosir. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dalam rancangan etnografi (Creswell, 2016). Pada bagian eksplorasi data kualitatif menggunakan pendekatan etnografi (Spradley, 2017) guna pengungkapan gambaran *native point of view* dan adaptasi sosial budaya masyarakat lokal berkenaan dengan *halal tourism* secara mendalam. Data kualitatif nantinya akan dianalisis dengan analisis etnografi Spradley (analisis wawancara etnografis, analisis domain, dan analisis taksonomi) dengan menggunakan aplikasi atlas.ti. Kemudian akan diinterpretasikan untuk menjawab polemik *halal tourism* di Kecamatan Simanindo.

Objek dalam penelitian ini adalah latarbelakang penolakan *halal tourism* pada masyarakat lokal, bentuk adaptasi sosial budaya dan daya dukung fisik *halal tourism* di Kecamatan Simanindo. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil observasi partisipasi dan wawancara etnografis. Adapun teknik pengumpulan datanya ialah:

1) Observasi Partisipasi

Observasi partisipasi adalah peneliti turut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Observasi partisipan bersifat eksploratif artinya menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam masyarakat dan lain-lain (Hasanah, 2017). Observasi ini dilakukan dengan cara ikut terlibat dan tinggal bersama (*life in*) di lingkungan hidup informan. Sehingga peneliti dapat mengamati dan mengumpulkan data terkait alasan penolakan dan adaptasi sosial budaya antara masyarakat setempat terkait *halal tourism*. Observasi juga dilakukan untuk mengumpulkan data daya dukung fisik *halal tourism* di Kecamatan Simanindo, seperti jumlah masjid, mushola, rumah makan halal dan pendukung lainnya. Hal ini

sebagai bahan pemetaan Arcgis 10.8. Keseluruhan hasil observasi akan dijabarkan dalam lembar observasi.

2) Wawancara etnografis dan penulisan logbook

Wawancara etnografis adalah serangkaian percakapan persahabatan yang dilakukan peneliti terhadap informan yang di dalamnya peneliti secara perlahan memasukkan beberapa unsur baru yang bertujuan untuk membantu informan memberikan jawaban asli (natural) sebagai seorang informan (Spradley, 2017). Wawancara etnografis dilakukan dengan bentuk wawancara tidak terstruktur namun mengikuti pedoman wawancara etnografis yang sudah dipersiapkan. Pengumpulan informasi akan berfokus pada sudut pandang masyarakat lokal (*native point of view*) dalam menemukan latarbelakang penolakan wacana *halal tourism* dan proses adaptasi sosial budaya pada masyarakat setempat di Kecamatan Simanindo. Kemudian Wawancara etnografis akan dilakukan pada masyarakat lokal, kemudian tokoh adat, kepala desa, dan pedagang rumah makan muslim di Kecamatan Simanindo. Adapun hasil wawancara akan dimuat pada logbook serta transkrip wawancara etnografis.

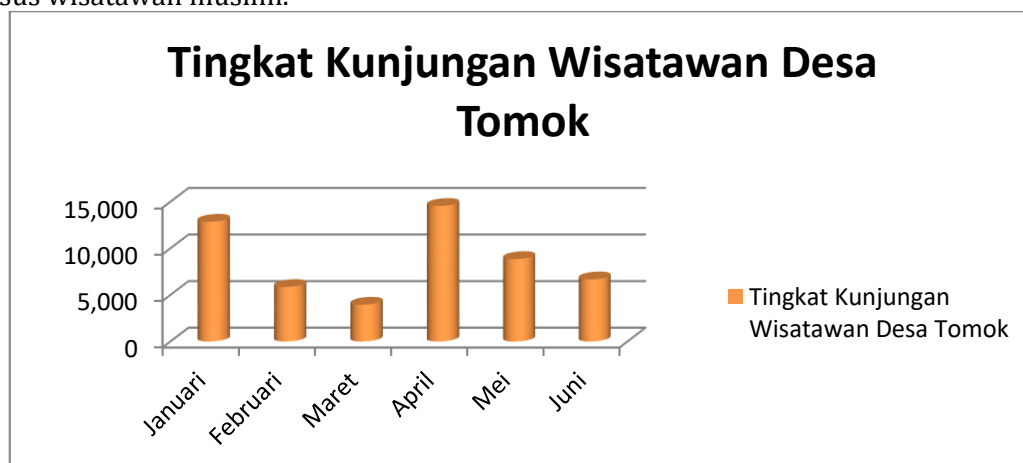
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, pada data kualitatif menggunakan analisis etnografis Spradley yang terdiri dari analisis wawancara etnografis merupakan penyelidikan berbagai bagian yang dikonseptualisasikan oleh informan kemudian peneliti menganalisis berbagai bahasa lokal dengan makna yang disampaikan informan. Analisis domain dilakukan peneliti dengan istilah mencakup dari apa yang disampaikan oleh informan, dan analisis taksonomi dilakukan dengan memfokuskan pertanyaan yang telah diajukan kepada informan sehingga teridentifikasi domain analisis taksonomi dengan pemahaman Ekologi Budaya Julian Steward (Spradley, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedaaan Desa Wisata Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir

Samosir adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Samosir dimekarkan pada tanggal 18 Desember 2003, Samosir dikenal sebagai daerah destinasi wisata hal ini dikarenakan Samosir memiliki banyak objek wisata yang mempesona dan menarik untuk dikunjungi baik objek wisata alam, objek wisata budaya dan sejarah. Keadaan ini juga didukung dengan dikeluarkannya keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2010-2025. sebagaimana Samosir terpilih menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Salah satu daerah Samosir yang memiliki beragam destinasi wisata yaitu desa Wisata Tomok, Kecamatan Simanindo.

Desa wisata Tomok merupakan salah satu desa bagian administratif Kecamatan Simanindo yang berada di pesisir timur Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara. Desa ini adalah salah satu desa yang menyimpan kekayaan budaya dan sejarah peradaban Batak Toba. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beragam situs sejarah kuno Batak Toba. Beberapa situs sejarah kebudayaan Batak ternama seperti Makam Raja Sidabutar, Museum Batak, batu kursi, hingga patung *Sigale-gale* turut mewarnai pesona Tomok sebagai destinasi wisata unggulan selain keindahan yang disuguhkan oleh Danau Toba (wisata alam). Keberagaman objek wisata di desa Wisata Tomok telah menjadi citra sekaligus daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara terkhusus wisatawan muslim.



Gambar 1. Tingkat Kunjungan Wisatawan pada Objek Wisata Desa Tomok
Sumber Gambar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir

Data pada diagram diatas menunjukkan bahwa tingkat pengunjung wisatawan yang berwisata ke Desa Wisata Tomok melonjak pada bulan April. Melalui data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, lonjakan wisatawan pada bulan April dikarenakan pada bulan tersebut adalah momentum Hari Raya Idulfitri. Sejumlah objek wisata yang ada di Desa Wisata Tomok menjadi destinasi kunjungan yang diminati oleh wisatawan khususnya muslim. Iriana Simbolon selaku Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, mengakui sejumlah destinasi wisata di Desa Wisata Tomok mulai ramai didatangi wisatawan muslim pada libur lebaran hari kedua. Kunjungan wisatawan muslim ke Desa Wisata Tomok tidak terlepas dari prasarana yang mendukung dilokasi wisata tersebut. Prasarana menjadi hal yang sangat urgen bagi wisatawan yang akan berkunjung pada destinasi wisata. Hal ini dibuktikan dengan persebaran rumah makan berlabel halal di Desa Wisata Tomok. Selain itu juga didapati rumah ibadah seperti mushalla dan penginapan yang menyediakan ruangan untuk shalat bagi wisatawan muslim.

Berdasarkan data diagram juga menunjukkan bahwa pada bulan Maret terjadi penurunan pengunjung ke Desa Wisata Tomok. Hal ini berkaitan dengan momentum puasa pada umat muslim, sehingga pengunjung lebih mengarah kepada wisatawan masyarakat lokal Batak Toba maupun wisatawan dari mancanegara. Untuk bulan Januari, Februari, Mei dan Juni juga memiliki jumlah pengunjung yang tidak merata baik secara peningkatan maupun penurunan wisatawan secara signifikan. Oleh karena itu, hari-hari besar pada bulan tertentu menjadi penentu melonjak atau berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

Latar Belakang Penolakan Wisata Halal di Desa Wisata Tomok Kecamatan Simanindo

Mengacu pada konsep pembangunan sosiologi rencana pembangunan serta dampak pembangunan sektoral pada elemen dasar bersifat sosiologis dan kehidupan sosial budaya harus mencakup 3 elemen yakni elemen struktural, kultural dan proses sosial (Wirutomo, 2022). Munculnya wacana penerapan wisata halal di kawasan Danau Toba memicu penolakan sebagai respon dari masyarakat lokal termasuk Desa Wisata Tomok Kecamatan Simanindo. Penolakan tersebut diwujudkan dalam bentuk demonstrasi yang memuat pesan aspirasi dalam spanduk yang bertuliskan "Danau Toba tidak butuh label halal". Adapun alasan khusus penolakan wisata halal di Desa Wisata Tomok Kecamatan Simanindo yaitu:

a. Secara struktural

Struktural dalam hal ini mencakup struktur regulasi. Struktur regulasi berhubungan dengan lembaga pemerintahan. Struktur regulasi adalah alat yang difungsikan sebagai upaya mempertahankan diri maupun mengubah diri. Dalam hal ini kekuatan dari luar individu adalah kekuatan yang berbentuk kelembagaan yang disebut dengan *structural instrument* (Wirutomo, 2022). Instrumen struktural adalah alat rekayasa sosial yang memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat (*social control*). Kekuatan struktural yang paling fundamental dan bersifat legal formal misalnya UUD, UU, kebijakan pemerintah, peraturan, program, dan perencanaan pembangunan. Dalam penelitian ini struktur regulasi berperan dalam perencanaan program *halal tourism* di daerah kawasan Danau Toba meliputi Samosir sebagai area wisata internasional sekaligus secara tidak langsung menjadi sasaran rencana *halal tourism* di Danau Toba. Sosialisasi seharusnya menjadi agenda penting dalam merilis suatu kebijakan. Hal inilah yang berkaitan dengan penolakan rencana *halal tourism* Danau Toba akibat belum adanya koordinasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir yang menjadi mediator bagi setiap daerah rencana penerapan *halal tourism* di Samosir. Berdasarkan hasil penelitian menegaskan bahwa masalah utama timbulnya penolakan terhadap rencana *halal tourism* adalah komunikasi publik yang belum tuntas hingga pada level *micro-government* (pemerintah lokal). Belum adanya penguatan edukasi berupa sosialisasi antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat setempat tentang *halal tourism* menimbulkan ambiguitas. *Halal tourism* ditafsirkan dengan tidak benar sebagai suatu proses pembatasan kehidupan sosial-kultural.

b. Secara kultural

Kultural merupakan elemen penting dalam konteks pembangunan. Meskipun demikian aspek kultural tanpa disadari seringkali terabaikan dalam proses perencanaan pembangunan. Aspek kultural adalah elemen yang berhubungan dengan kebudayaan. Menurut Selo Soemarjan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang digerakan oleh karsa (Sita, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan mencakup semua aspek dalam

masyarakat. Kebudayaan bagi manusia bukan hanya sebatas keadaan eksistensial melainkan sebagai pembentuk ciri khas, identitas, dan kohesi sosial. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pembangunan harus berlandaskan pada dimensi kultural yang tercermin sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan lokal (*local wisdom*).

Dalam penelitian ini hadirnya wacana wisata halal dilihat sebagai suatu upaya menghegemoni masyarakat lokal dengan sebuah identitas yang tidak melekat pada diri mereka. Diksi halal dinilai mengacu pada entitas muslim yang hanya akan menciptakan pembatasan-pembatasan pada ranah kehidupan sosial-budaya masyarakat lokal Batak Toba. Penolakan wisata halal dibenturkan dengan budaya lokal yang dianggap tidak sesuai dengan wacana wisata halal tersebut. Wisata halal dinilai menciptakan eksklusivisme budaya yaitu menutup akses masyarakat lokal terhadap kearifan lokal dalam bentuk ekosistem ekonomi dan ekosistem adat-istiadat. Seperti daging Babi menjadi elemen penting dalam aktivitas budaya masyarakat Batak Toba. Babi merupakan hewan yang bernilai tinggi dalam nilai tradisi masyarakat Batak Toba. Hal ini dikarenakan babi memiliki fungsi budaya sebagai ternak adat yang selalu dipanggungkan setiap pelaksanaan upacara adat Batak Toba. Umumnya, babi dihidangkan pada tradisi peralihan (*life cycle*), antara lain *tardidi* (baptisan), *martumpol* (perkawinan), dan *mate saur matua* (kematian). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa babi sebagai ternak adat memiliki fungsi budaya yang terletak pada penggunaan *sulang* (bagian-bagian tubuh) tertentu yang dikenal dengan istilah *jambar*. *Jambar* merupakan simbolisasi pengakuan terhadap kelembagaan sosial *dalihan na tolu*.

Pada dimensi budaya ekonomi lokal Adanya kekhawatiran pelarangan rumah makan Batak dan sistem jual beli babi. Hadirnya *halal tourism* dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas sosial ekonomi masyarakat lokal Batak Toba terhadap proyeksi pelarangan operasional rumah makan khas Batak yang menyediakan menu babi. Selain itu, perspektif halal dinilai dapat mengganggu keberadaan hewan anjing sebagai peliharaan lokal yang berfungsi sebagai sistem proteksi tradisional bagi masyarakat lokal Batak Toba. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat secara luas untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka (Syakhrani & Kamil, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, sebagian masyarakat lokal Batak Toba masih menjadikan babi sebagai komoditas ekonomi. Peternakan babi yang masih berlaku dikawasan Danau Toba tepatnya di Desa Wisata Tomok tidak lain alasannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sekalipun Desa Wisata Tomok menjadi destinasi favorit wisatawan, keberadaan ternak babi masih eksis. Hal ini dipicu dominasi usia produktif pada sektor pariwisata, sehingga masyarakat lokal dengan kategori lanjut usia menaruh fokus aktivitas ekonominya pada ternak babi sebagai sandaran hidup. Wacana *halal tourism* yang dicanangkan akan diterapkan di kawasan Danau Toba jelas memicu penolakan dari masyarakat lokal Batak Toba yang bermatapencaharian sebagai peternak babi. Dalam tafsiran masyarakat lokal, penerapan *halal tourism* akan menghilangkan sumber mata pencaharian mereka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *halal tourism* dimaknai dapat memberikan ancaman terhadap keberadaan ternak babi yang menjadi tumpuan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat lokal yang tidak berkecimpung pada sektor pariwisata. Selain itu, hadirnya rencana *halal tourism* menciptakan keguncangan sosial yang ditandai dengan adanya rasa takut masyarakat lokal yang memperkirakan *halal tourism* akan melahirkan suatu aturan baru dalam penataan ulang tata ruang lokasi khusus peternakan babi. Masyarakat lokal Batak Toba meyakini bahwa *halal tourism* hanya akan membawa mereka pada dua pilihan yaitu antara relokasi atau penggusuran.

c. Proses sosial

Elemen proses sosial mengacu pada dinamika interaksi sosial yang terjadi secara informal yang dapat dilihat dari cara berhubungan para individu dan kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut (Wirutomo, 2022). Dalam hal ini proses sosial dihadapkan pada ruang sosial masyarakat lokal Batak Toba dalam bersosialisasi dengan sesamanya. Masyarakat lokal Batak Toba di Desa Tomok memiliki Kebiasaan setempat pemeliharaan anjing, adanya kebiasaan mengkonsumsi tuak dan memakan tambul daging babi dalam *lapo tuak*. Babi juga merupakan salah satu hidangan yang umumnya menghiasi setiap *lapo tuak* yang dikenal dengan istilah *tambul*. *Tambul* adalah makanan yang selalu dihidangkan saat minum *tuak* yang bersifat makanan ringan sampai makanan berat. Sajian babi sebagai *tambul* yang dipadukan dengan *tuak* menjadi pola konsumsi yang melengkapi kehidupan masyarakat Batak Toba dalam bersosialisasi dengan sesama masyarakat lokal. Selain itu, *lapo*

tuak dan *tambul* berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan harmonisasi sosial. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *lapo tuak* merupakan ruang publik sebagai arena interaksi sosial masyarakat Batak Toba yang dihiasi dengan jalinan keakraban antar-peminum. Soetanto & Gandha (2021) menjelaskan bahwa *lapo tuak* juga memiliki ciri yakni terbuka bagi siapa saja. *Lapotuak* biasanya digunakan sebagai tempat melepas dahaga. *Lapo tuak* dapat digunakan sebagai sarana adu diskusi rasional.

Adaptasi Sosial Budaya Terkait *Halal Tourism* dalam Analisis Budaya Julian Steward di Desa Wisata Tomok Kecamatan Simanindo

Secara gagasan *halal tourism* mengalami penolakan bagi masyarakat lokal Batak Toba. Namun pada praktiknya masyarakat lokal telah mampu menciptakan destinasi wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan, pembauran dan penyesuaian antara masyarakat lokal Batak Toba dengan penduduk pendatang muslim yang terdiri dari etnis Jawa dan Minang. Realitas sosial ini merupakan strategi yang menjadi citra positif bagi keberlangsungan serta keberlanjutan Desa Wisata Tomok dalam peningkatan kualitas taraf hidup. Dalam ekologi budaya Julian Steward dijelaskan bahwa adanya proses penyesuaian diri secara berkesinambungan dan dilakukan oleh manusia dengan lingkungan dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya yang dilihat dari faktor budaya. adaptasi ekologi budaya berfokus pada penerapan konsep dan asas ekologi yang melihat aspek-aspek kehidupan sosial dan kebudayaan yang benar-benar cocok dan sesuai dengan masyarakat. Selain itu, ekologi budaya juga melihat adanya pembagian kerja atau model pengorganisasian kerja dalam masyarakat serta mekanisme pengaturan pemukiman tempat tinggal sebagai aspek yang mempengaruhi nilai alam (Efriani, 2020). Adapun dinamika adaptasi sosial budaya dalam analisis ekologi budaya Julian Steward mencakup *culture core*, *socialcultural integration*, fitur budaya, eksploitasi lingkungan, dan subsistensi lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. *Culture core* yaitu unsur budaya yang berhubungan dengan kegiatan subsistensi yang meliputi sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik dan teknologi. Dalam hal ini ditandai adanya ikatan ekonomi yang terjalin antara masyarakat lokal Batak Toba dengan penduduk pendatang muslim yang terdiri dari etnis Jawa dan Minang. Ikatan ekonomi diwujudkan dalam hubungan perdagangan yaitu: (1) masyarakat lokal sebagai pemilik usaha dagang berupa rumah makan muslim dengan memperkerjakan penduduk pendatang muslim sebagai pengelola, (2) penduduk pendatang sebagai pemilik rumah makan muslim melakukan kerjasama dengan masyarakat lokal sebagai pemasok bahan baku makanan. Terdapat 11 Rumah Makan Muslim yang berada sejajar disepanjang jalan pada wilayah Tomok Parsaoran. Sebanyak 2 Rumah Makan Muslim dengan pemilik masyarakat lokal Batak Toba yaitu RM. Face Food yang dimiliki oleh Bapak Sidabutar dan RM. Berkah yang dimiliki Bapak Sinaga memperkerjakan masing-masing 2 orang yang merupakan pendatang muslim etnis Jawa. Sedangkan 9 Rumah Makan Muslim lainnya yang dimiliki oleh penduduk pendatang muslim etnis Minang melakukan kerja sama dengan masyarakat lokal Batak Toba untuk memenuhi kebutuhan persediaan bahan baku makanan seperti ikan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah masakan.
- b. *Socialcultural integration* yaitu cara pandang budaya terhadap masyarakat sebagaimana proses penerimaan pendatang baru atau minoritas tergabung ke dalam struktur masyarakat setempat. Dalam hal ini *socialcultural integration* diwujudkan dengan adanya pelibatan masyarakat pendatang muslim pada aktivitas budaya Batak Toba yang memiliki peran sosial sebagai *parhobas*. *Parhobas* dalam budaya Batak Toba merupakan satuan pekerja dalam aktivitas adat yang bekerja secara sukarela. Secara khusus tugas *parhobas* dalam hal ini adalah menyiapkan menu masakan untuk acara adat Batak Toba yang salah satunya disebut dengan *parsubang*. *Parsubang* merupakan suatu istilah Batak Toba yang mengacu pada "*subang*" yang memiliki arti "berpantangan". *Parsubang* adalah kelompok partisipan dari aktivitas adat yang mempunyai larangan untuk tidak memakan menu daging babi.
- c. *Fitur budaya* yaitu karakteristik khusus yang terdapat pada masyarakat. Setiap kelompok masyarakat yang berada di suatu wilayah tertentu membawa fitur budaya masing-masing dan mengalami proses penyesuaian dengan fitur budaya lain di tempat mereka tinggal. Demikian pula yang terjadi di Desa wisata Tomok Parsaoran sebagaimana adanya proses penyesuaian yang terjadi antara masyarakat lokal Batak Toba dengan pendatang muslim. Adaptasi budaya diwujudkan dalam interaksi sosial untuk memelihara pola hubungan yang ditandai dengan partisipasi sosial pendatang muslim dalam aktivitas adat yang dikenal dengan sebutan

“*martuppak*”. *Martuppak* adalah serapan dari kata “*tuppak*” yang memiliki arti “sokongan”. Secara khusus *martuppak* merupakan sumbangan atau bantuan sosial dalam bentuk uang. *Tuppak* biasanya diberikan oleh para tamu kepada *suhut* atau pihak penyelenggara pesta. Sikap serta perilaku pendatang muslim yang bersifat terbuka menciptakan praktik resiprositas dengan masyarakat lokal Batak Toba. Hal ini juga dapat terlihat melalui hubungan timbal-balik yang terjalin dari kedua kelompok sosial yang saling berperan dalam pemberian bantuan sosial (pertukaran) pada aktivitas adat. Pertukaran sosial ini bukan hanya sebatas pertukaran untuk memenuhi partisipasi sosial saja, melainkan sebagai alat untuk menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat.

- d. Eksploitasi lingkungan yaitu pola tindakan masyarakat terhadap lingkungan. Pola tindakan masyarakat dalam melakukan eksploitasi produksi sumber daya merupakan bentuk adaptasi ekologi budaya sebagai upaya strategi bertahan dari kedua kelompok masyarakat. Data demografi penduduk menunjukkan bahwa 80% penduduk Desa Wisata Tomok baik masyarakat lokal maupun pendatang muslim (Jawa dan Minang) menggantungkan dirinya pada sektor pariwisata yang terdiri dari pelaku wisata, pengelola wisata hingga pedagang souvenir dan pemilik rumah makan/restoran. Bentuk adaptasi ekologi sosial budaya yang terjadi adalah terciptanya tipologi wilayah berdasarkan pemanfaatan lahan. Pembagian tata ruang wilayah didasarkan pada kearifan lokal masyarakat Batak Toba yang dikenal dengan “*huta*” atau “kumpulan kampung”. Terdapat penamaan khusus dalam mekanisme pembentukan *huta* yang dapat ditentukan melalui satuan marga atau tali ikatan keturunan (kekerabatan). Penamaan *huta* juga biasanya didasarkan pada pesan sosial yang hendak disampaikan pada masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Desa wisata Tomok memiliki dua pembagian arena wilayah yaitu Tomok Pardamean dan Tomok Parsaoran. Kata “*pardamean*” dan “*parsaoran*” memiliki makna yang arif dalam menjalankan kehidupan sosial bagi masyarakat Batak Toba. *Pardamean* memiliki arti “pecinta damai” dan *parsaoran* bermakna “suka berkumpul” kedua falsafah ini mengajarkan konsep persahabatan dan harmonisasi sosial tanpa adanya permusuhan dan kekerasan. Persebaran pendatang Muslim (Jawa dan Minang) lebih banyak ditemukan di wilayah Tomok Parsaoran yang mayoritasnya juga memiliki usaha dagang Rumah Makan Muslim (halal). Sedangkan masyarakat lokal Batak Toba cenderung lebih merata di seluruh wilayah Desa Wisata Tomok. Namun menempatkan usaha dagang Rumah Makan Khas Batak mereka di wilayah Tomok Pardamean. Hal ini merupakan wujud kompromi sosial sekaligus bentuk toleransi yang mempermudah wisatawan muslim menemukan layanan Rumah Makan Halal.
- e. Subsistensi lingkungan yaitu pemeliharaan lingkungan sosial secara berkelanjutan. Kebudayaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yaitu ekologi fungsional yang menciptakan stabilitas kebudayaan. Ekologi budaya merupakan suatu konsep sistem yang menekankan pada asas seperangkat objek bersama dengan hubungan antara objek-objek dan antara atribut-atribut. Dalam penelitian ini manusia dengan pengetahuan lokal merupakan dua unsur penting dari terwujudnya nilai-nilai budaya yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut (Sihombing Dkk, 2018), masyarakat Batak Toba memiliki nilai budaya berupa falsafah sebagai sistem kemasyarakatan yang mengatur tata-cara hubungan sosial yang dikenal dengan istilah *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* atau “tiga tungku” merupakan konsep filosofis yang menentukan kedudukan fungsional sosio-kultural masyarakat Batak Toba: (1) *Somba Marhula-hula* memiliki makna hormat dan menjunjung tinggi martabat keluarga laki-laki dari pihak marga istri (2) *Manat Mardongan Tubu*, mempunyai arti saling menopang dan tolong menolong diantara sesama marga (3) *Elek Marboru*, memiliki arti mengasihi, mangayomi dan melindungi pihak perempuan tanpa melihat status sosial. Wawasan sosio-kultural inilah yang hingga saat ini masih dipedomani masyarakat Batak Toba di Desa Wisata Tomok dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan pendatang muslim yang terdiri etnik Jawa dan Minang. Sebagaimana *Dalihan Na Tolu* menanamkan nilai moralitas yang menjunjung tinggi sikap toleransi, integritas, partisipasi dan tanggungjawab sosial. Pembauran sosial terjadi melalui proses *Martutur*, yaitu suatu kearifan lokal Batak Toba dalam berkomunikasi dengan sesama manusia yang dihiasi dengan keramahan-tamahan dan sopan santun. Tujuan *Martutur* adalah mengetahui pemosisian hubungan sosial melalui identitasnya. Melalui proses *Martutur* terciptanya daya rekat atau ikatan yang menjaga masyarakat tetap bersatu atau terintegrasi. Sebagaimana setiap kelompok masyarakat memiliki kecenderungan dalam menciptakan kohesivitas sosial.

SIMPULAN

Keberagaman objek wisata di desa Wisata Tomok telah menjadi citra sekaligus daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara terkhusus wisatawan muslim. Kunjungan wisatawan muslim ke Desa Wisata Tomok tidak terlepas dari prasarana yang mendukung dilokasi wisata tersebut. Prasarana menjadi hal yang sangat urgen bagi wisatawan yang akan berkunjung pada destinasi wisata. Namun munculnya wacana penerapan wisata halal di kawasan Danau Toba memicu penolakan sebagai respon dari masyarakat lokal termasuk Desa Wisata Tomok. Secara struktural, ambiguisitas atau ketidakjelasan konseptualisasi penerapan wisata halal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu alasan adanya gerakan penolakan masyarakat lokal terhadap wacana wisata halal. Kemudian secara kultural, halal dinilai mengacu pada entitas muslim yang hanya akan menciptakan pembatasan-pembatasan pada ranah kehidupan sosial-budaya masyarakat lokal Batak Toba. Ekosistem sosial yaitu gangguan terhadap keberadaan *lapo* tuak dan kebiasaan masyarakat Batak Toba dalam mengkonsumsi minuman tradisional tuak.

Terdapat adaptasi sosial budaya kemasyarakatan yaitu *culture core*, ditandai adanya ikatan ekonomi yang terjalin antara masyarakat lokal Batak Toba dengan penduduk pendatang muslim yang terdiri dari etnis Jawa dan Minang. *Socialcultural integration* diwujudkan dengan adanya pelibatan masyarakat pendatang muslim pada aktivitas budaya Batak Toba yang memiliki peran sosial sebagai *parhobas*. Fitur budaya terjadi di Desa wisata Tomok Parsaoran sebagaimana adanya proses penyesuaian yang terjadi antara masyarakat lokal Batak Toba dengan pendatang muslim. Eksploitasi lingkungan yaitu pola tindakan masyarakat dalam melakukan eksploitasi produksi sumber daya merupakan bentuk adaptasi ekologi budaya sebagai upaya strategi bertahan dari kedua kelompok masyarakat. Terakhir adalah subsistensi lingkungan, kebudayaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yaitu ekologi fungsional yang menciptakan stabilitas kebudayaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada KEMENDIKBUDRISTEK sebagai pemberi dana dalam penelitian, ucapan terimakasih kepada Universitas Negeri Medan sebagai pemberi bantuan dana, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir dan masyarakat Desa Wisata Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir sebagai informan dalam penelitian, serta ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing yang turut membantu dalam kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. J., & others. (2022). *Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Wisata Syariah Di Kota Sabang*. UIN Ar-Raniry.
- Creswell, J. W. (2016). Reflections on the MMIRA the future of mixed methods task force report. In *Journal of Mixed Methods Research* (Vol. 10, Issue 3, pp. 215–219). Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Efriani, E. (2020). Adaptasi Ekologi Penduduk Transmigrasi di Desa Rasau Jaya Satu. *Pangadereng*, 6(1), 1–12.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hidayati, A. P., Nisa, S. F., Hamidah, A., & Ule, Y. N. (2022). IMPLEMENTASI WISATA HALAL INDONESIA: POLEMIK CENTER OF HALAL TOURISM DI KOTA MALANG. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7).
- Makhasi, G. Y. M., & Rahimmadhi, M. T. Y. (2020). Ramai-ramai menolak wisata halal: kontestasi politik identitas dalam perkembangan wisata halal di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 373–388.
- Marbun, S. (2022). DISKURSUS PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH DI BALI. *Authorea Preprints*.
- Nasution, F. R., Yusrizal, M. S., & Harahap, M. I. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah di Masa New Normal. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 1(2), 128–142.
- Putra, T. W. (2021). Development Of Halal Tourism The Land Above The Clouds In North Toraja Regency. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 239–252.
- Santoso, L., & Cahyani, Y. T. (2020). Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok. *Fishum*, 15(1), 23–44.
- Sihombing, A. A., & others. (2018). Mengenal budaya Batak Toba melalui falsafah *dalihan na tolu* (Perspektif kohesi dan kerukunan). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(2), 347–371.
- Sita, P. S. (2013). Pengaruh Kebudayaan Asing Terhadap Kebudayaan Indonesia Di Kalangan Remaja. *Surabaya: ITS*.
- Soetanto, L. A., & Gandha, M. V. (2021). Dalihan Na Tolu: Cara Hidup Orang Batak. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(1), 297–308.

- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. PT Tiara Wacana.
- Sugiyarto, S., & Amaruli, R. J. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 45-52.
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Journal Form of Culture*, 5(1), 1-10.
- Tarigan, R. E., & Basit, A. (2020). Penolakan Publik terhadap Program Wisata Halal Danau Toba. *Nyimak: Journal of Communication*, 4(1), 125-134.
- Wirutomo, P. (2022). *BOOK REVIEW: CRITICAL NOTES ON IMAJINASI SOSIOLOGI: PEMBANGUNAN SOSIETAL*.